

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi Bagian Operasi Polresta Padang dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf yang menyelenggarakan perencanaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan, analisis dan evaluasi, serta dukungan administrasi dan logistik operasi kepolisian. Pelaksanaan fungsi tersebut diawali dengan penyusunan rencana operasi berdasarkan analisis situasi keamanan, data kriminalitas, informasi intelijen, dan laporan masyarakat. Selanjutnya, Bag Ops melakukan koordinasi dengan Satresnarkoba, Satintelkam, Satsamapta, dan satuan fungsi lainnya untuk mendukung pelaksanaan operasi, melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap jalannya operasi agar sesuai dengan prosedur, melaksanakan analisis dan evaluasi sebagai dasar penyusunan strategi operasi berikutnya, serta memberikan dukungan administrasi dan logistik guna menunjang kelancaran operasi.
2. Hambatan yang dialami oleh Bagian Operasi Polresta Padang dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba meliputi belum

optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan satuan fungsi dalam pelaksanaan operasi, keterbatasan data dan informasi intelijen yang akurat sebagai dasar penentuan sasaran operasi, sulitnya pembuktian terhadap jaringan peredaran gelap narkoba yang bersifat terorganisasi, keterbatasan dukungan anggaran serta sarana dan prasarana operasional, serta rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai tindak pidana narkoba.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagian Operasi Polresta Padang perlu meningkatkan optimalisasi perencanaan dan koordinasi operasi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui penguatan mekanisme koordinasi rutin dengan Satresnarkoba, Satintelkam, dan satuan fungsi terkait. Koordinasi tersebut perlu didukung dengan pertukaran data dan informasi secara terpadu, sehingga penentuan sasaran operasi dapat dilakukan berdasarkan analisis intelijen yang akurat dan tepat sasaran. Selain itu, pelaksanaan analisis dan evaluasi setiap kegiatan operasi perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan serta menyusun strategi penindakan yang lebih efektif.
2. Polresta Padang perlu meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi Bagian Operasi melalui pemenuhan sarana prasarana, peningkatan

kemampuan personel, serta penguatan kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait. Peningkatan kemampuan personel dapat dilakukan melalui pelatihan mengenai manajemen operasi, pengolahan informasi intelijen, serta strategi pemberantasan jaringan narkoba. Di samping itu, diperlukan peningkatan peran masyarakat melalui program penyuluhan dan pembentukan jaringan informasi masyarakat agar masyarakat lebih aktif melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, sehingga upaya pengungkapan tindak pidana narkoba dapat berjalan lebih efektif.

3. Kepolisian Daerah Sumatera Barat melalui Polresta Padang perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem analisis data dalam mendukung pelaksanaan fungsi Bagian Operasi. Penggunaan basis data kriminal, pemetaan daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, serta analisis tren tindak pidana secara berkala akan membantu Bagian Operasi dalam menyusun rencana operasi yang lebih terarah dan berbasis data. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan operasi terpadu untuk memutus jaringan peredaran narkoba serta meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Padang.